

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2021**



**KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Kecamatan Cimerak Tahun 2019 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Cimerak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2019 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja tahun 2019.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimerak tahun 2019 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Kecamatan Cimerak**

#### **1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi - Seksi
  - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cimerak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan peneapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek : perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Cimerak dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

### **1.3.2 Potensi Kecamatan Cimerak**

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kecamatan Cimerak antara lain adalah Kegiatan perekonomian Kecamatan Cimerak yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan, tetapi bagaimana hasil pertanian dapat menghasilkan produk yang berkualitas, hasil yang optimal dan manajemen pemasaran yang handal, yang pada akhirnya pertanian menjadi industri yang menghasilkan produk pertanian yang dapat bersaing dipasar global. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Cimerak, antara lain luasnya sumber daya lahan, Kondisi sosial

budaya masyarakat Kecamatan Cimerak yang agamis, partisipatif dan kebersamaan merupakan modal utama yang menunjang terhadap kegiatan pembangunan.

Tabel 1.1  
Potensi Kecamatan Cimerak

No	Bidang	Potensi
1	Bidang Pariwisata	<p>Potensi yang sudah ada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Masawah : Pantai Madasari</li> <li>- Desa Cimerak : Green Canyon (Janggala)</li> </ul> <p>Potensi yang perlu pengembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Sukajaya : Goa Kolor, Goa Bagong, Goa Ayam, Body Rafting dan Desa Wisata</li> <li>- Desa Kertamukti : Pantai Keusik Luhur, Pantai Balekambang,</li> </ul>
2	Bidang Sosial Budaya	Desa Kertamukti dengan Seni Budaya Kuda Lumping, Desa Limusgede: Calung Kombinasi, Ebeg.
3	Bidang Perikanan	<p>Perikanan Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Legokjawa : TPI Legokjawa</li> <li>- Desa Masawah : TPI Madasari</li> <li>- Desa Kertamukti : TPI Muaragatah</li> </ul> <p>Perikanan Kolam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Batumalang : Kolam Pembesaran/ Budidaya Ikan Berbagai Jenis (BBI)</li> <li>- Desa Limusgede : Budidaya Ikan Lele</li> <li>- Desa Legokjawa : Tambak Udang</li> <li>- Desa Mekarsari: Budidaya Ikan Mas</li> </ul>
4	Bidang Transportasi	Tidak ada
5	Bidang Pertanian	Luas sawah yang sudah ada : 2,764 hektar Luas sawah baru : 14,33 hektar
6	Bidang Perekonomian	<p>1. Lembaga Keuangan Mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Legokjawa : LPK, BRI Unit Ciparanti</li> <li>- Desa Cimerak : UPK, BRI Unit Cimerak</li> </ul> <p>2. Usaha Mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Legokjawa : Pengrajin makanan Sale</li> <li>- Desa Limusgede : Pengrajin makanan Sale, Keripik, Pengrajin anyaman Lidi dan Bambu</li> <li>- Desa Kertamukti : Pengrajin Makanan Keripik Singkong</li> <li>- Desa Ciparanti : Pengrajin makanan Semprong, Sale</li> <li>- Desa Cimerak : Pengrajin makanan Keripik Singkong</li> </ul>

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN**

##### **2.1.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimerak merupakan satu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kecamatan Cimerak yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

##### **2.1.2 Visi dan Misi**

###### **VISI**

SKPD Kecamatan Cimerak Yaitu **“MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABLE SEBAGAI PENUNJANG KAWASAN UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PARIWISATA DI PANGANDARAN”**

###### **MISI**

1. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.

## 5. Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mewujudkan pemerintahan yang baik setiap kebijakan publik beserta proses permusyawaratannya diikuti, diketahui dan di pahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam permusyawaratan, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakonodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Visi, Misi menerangkan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target kinerja sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cimerak tahun 2016-2021

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi Kecamatan Cimerak adalah sebagai berikut :

### **Misi Pertama,**

Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Misi Kedua:**

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

### **Misi Ketiga,**

Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

### **Misi Keempat,**

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.

### **Misi Kelima,**

Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

## 2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
<b>Misi Pertama:</b> Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
<b>Misi Kedua:</b> Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada

		Masyarakat
<b>Misi Ketiga:</b> Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
<b>Misi Keempat :</b> Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang dan mengembangkan ekonomi di bidang industry dan pariwisata	Terwujudnya Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kawasan industri dan pariwisata.
<b>Misi Kelima :</b> Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/Kelurahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukurang tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

### **2.3 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama**

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimerak sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	
3	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	

## 2.4 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

No	Sasaran	Program
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan PerencanaannPembangunan Partisipatif

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

## 2.6 Target Kinerja Program

No	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		34.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		21.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		769.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan		9.181.108

			Perlengkapan Kantor		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4.763.250
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.600.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.980.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		450.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.028.089
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		22.032.900
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18.397.905
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.050.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		27.600.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan		244.200.000

		dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		0
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1.200.000
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		18.774.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		16.186.000
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		2.588.000

## 2.7 Target Kinerja Kegiatan

**Tabel 2.2**  
**Target Kinerja Kegiatan Kecamatan Cimerak Tahun 2021**

No	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		34.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		21.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		0
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		769.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		9.181.108
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4.763.250
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan		3.600.000

		undangan	Perundang-undangan		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2.980.000
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat		450.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		18.028.089
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		22.032.900
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18.397.905
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.050.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		27.600.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		244.200.000
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat		0

		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1.200.000
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		18.774.000
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		16.186.000
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		2.588.000

## 2.8 Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2.3

Laporan Anggaran Per Sasaran Kecamatan Cimerak tahun 2021

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	965.831.286
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	-
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	16.186.000

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Kecamatan Cimerak berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan :

**3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021**

Tabel 3.1  
Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Cimerak

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Program</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	965.831.286
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	-  16.186.000

### 3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021

Tabel 3.2  
Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Cimerak  
**TAHUN 2020**

No	Urusan/Bidang Pemerintahan dan Program/Kegiatan	Urusan Daerah	Realisasi Kinerja Renja kab/kota dievaluasi	Capaian Anggaran Perangkat Daerah yang	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)
			Rp.	Rp.	Rp.
<b>1</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>
<b>A</b>	<b>'Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>		<b>193.253.149</b>		<b>56,81%</b>
	<b>KECAMATAN CIMERAK</b>		<b>193.253.149</b>		<b>56,81%</b>
	<b>Administrasi Pemerintahan</b>		<b>193.253.149</b>		<b>56,81%</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>89.419.516</b>		<b>72,81%</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		498.000		100,00%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12.524.530		53,30%
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional		537.900		20,30%
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		14.184.800		78,78%
1.5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		21.000.000		76,09%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga		9.600.000		76,19%
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor		8.310.000		70,16%
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		5.753.300		70,15%

1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	234.000	100,00%
1.9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.700.000	75,00%
1.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.400.000	100,00%
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	4.426.986	100,00%
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	7.250.000	100,00%
1.13	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)			
Predikat Kinerja			
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>9.863.733</b>	<b>76,38%</b>
2.1	Pengadaan Mebeleur	-	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/oprasional	9.213.733	75,13%
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	650.000	100,00%
2.5	Pengadaan Komputer	-	
2.6	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)			
Predikat Kinerja			
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>2.970.000</b>	<b>10,00%</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	2.970.000	<b>10,00%</b>
Rata-rata capaian kinerja (%)			10,00%
Predikat Kinerja			SR
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	-	

4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)			
Predikat Kinerja			
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>71.399.900</b>	<b>82,35%</b>
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	-	
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	
5.6	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	15.960.000	<b>75,78%</b>
5.4	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	15.970.200	<b>75,80%</b>
5.5	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	15.900.000	<b>75,71%</b>
5.6	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	23.569.700	<b>100,00%</b>
5.7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)			
Predikat Kinerja			
<b>6</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan</b>	<b>19.600.000</b>	<b>17,07%</b>
6.1	Monitoring dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	-	
6.2	Monitoring Hibah Bansos dan bantuan keuangan ke Desa	-	
6.3	Penanganan Pencegahan Virus COVID-19	19.600.000	<b>100,00%</b>
6.4	Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	-	<b>0,00%</b>

## REALISASI TAHUN 2021

No	SKPD/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)
			Rp	Kinerja	
1	3	5	10 = 6+7+8+9		11 = 10/5*100
	<b>KECAMATAN CIMERAK</b>	1.862.794.651,00	100,00	1.040.445.047,00	55,85
		1.576.527.799,00	100	899.271.047,00	57,04
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.576.527.799,00		899.271.047,00	57,04
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.125.000,00	100	21.000.000,00	74,67
	Koordinasi dan Capaian Penyusunan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64.725.000,00	100	33.600.000,00	51,91
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.224.720.585,00	100	722.649.987,00	59,01
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.125.000,00	100	21.000.000,00	74,67
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.418.625,00	100	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	803.328,00	100	769.000,00	95,73
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.646.108,00	100	8.345.200,00	65,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.475.453,00	100	4.762.850,00	50,27
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.160.000,00	100	3.300.000,00	40,44
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.015.000,00	100	2.980.000,00	17,51

	<b>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>38.400.000,00</b>	<b>100</b>	<b>16.245.505,00</b>	<b>42,31</b>
	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>29.092.052,00</b>	<b>100</b>	<b>20.262.400,00</b>	<b>69,65</b>
	<b>Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas ,Operasional atau Lapangan</b>	<b>55.171.648,00</b>	<b>100</b>	<b>16.461.105,00</b>	<b>29,84</b>
	<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>17,04</b>
	<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>100</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>68,28</b>
		<b>231.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>52,47</b>
	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<b>231.000.000,00</b>		<b>121.200.000,00</b>	<b>52,47</b>
	<b>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>	<b>231.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>121.200.000,00</b>	<b>52,47</b>
		<b>15.591.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>7,70</b>
		<b>15.591.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>7,70</b>
	<b>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	<b>13.693.000,00</b>	<b>100</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>8,76</b>
		<b>39.675.852,00</b>	<b>100</b>	<b>18.774.000,00</b>	<b>47,32</b>
		<b>39.675.852,00</b>		<b>18.774.000,00</b>	<b>47,32</b>

	<b>Fasilitas Administrasi Tata pemerintahan Desa</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>100</b>	-	-
	<b>Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</b>	<b>22.165.852,00</b>	<b>100</b>	<b>16.186.000,00</b>	<b>73,02</b>
	<b>Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan</b>	<b>13.817.000,00</b>	<b>100</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>18,73</b>

### 3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Cimerak s/d tahun 2021 dengan target jangka menengah

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Realisasi s/d th 2021</b>	<b>Target jangka menengah</b>
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Ada
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	100 %	Ada
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	Ada

### 3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan standar nasional

Tabel 3.4  
perbandingan realisasi kinerja Kec. Cimeraks/d tahun 2021 dengan standar nasional

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Realisasi th 2021</b>	<b>Standar Nasional</b>
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100 %	
2.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	100 %	
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100 %	

### 3.1.5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5  
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Kecamatan Cimerak dan Solusi yang dilakukan

No.	Sasaran	Penurunan	Solusi
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Tidak ada penurunan	
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Tidak ada penurunan	
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tidak ada penurunan	

### 3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6  
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Kecamatan Cimerak dan Solusi yang dilakukan

No.	Sasaran	Efisien/tidak efisien	Alasan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Efisiensi	
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	Efisiensi	
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Efisiensi	

### 3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.7

Analisis Program penunjang/bukan penunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Cimerak tahun 2021

No	Sasaran	Program	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	965.831.286
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	- 16.186.000

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

Tabel 3.2

Realisasi Anggaran per Sasaran/Program Kec. Cimerak tahun 2021

No	Sasaran	Program	Realisasi Anggaran
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Publik	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	965.831.286
3	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	- 16.186.000

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cimerak Tahun 2019 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cimerak, sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya kemampuan dan terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program dan kegiatan.
5. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Kepala Seksi dan belum sesuai formasi pegawai yang sudah ditetapkan.
6. Kurangnya peralatan komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan terhadap masyarakat.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa mebeleur, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer, printer dan perlengkapannya.
2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.

4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cimerak Tahun 2019 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat Pemerintah Kecamatan Cimerak di tahun mendatang.

Cimerak, Desember 2021

CAMAT CIMERAK  
  
**ATANG KUNCARA, S.IP**  
Pangkat : Pembina, IV/a  
NIP. 19650607 198603 1 019